

Masalah hukum dalam perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit : Studi kasus pada PT.SHM dengan koperasi PGH dan tindakan notaris dalam menghadapi perjanjian kemitraan inti plasma dalam perkebunan kelapa sawit = Legal issues in the partnership agreement, the core plasma of oil palm plantations : a case study on PT. SHM with Cooperative PGH and action notary in the face of the plasma core partnership agreements oil palm plantations

Sinaga, Rudianto Salmon, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20251637&lokasi=lokal>

Abstrak

Hubungan kemitraan sebagai salah bentuk hubungan kerjasama antara pekebun kelapa sawit dengan perusahaan sebagai pemilik modal dan teknologi didasarkan pada suatu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit. Dalam implementasinya banyak terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam hubungan ini. Notaris sebagai pejabat pembuat akta memiliki fungsi pengawasan yang dapat menutup peluang terjadinya kecurangan dengan cara menciptakan atau membuat perjanjian yang baik dengan pertimbangan-pertimbangan akibat hukum yang muncul dari perjanjian. Oleh karena itu sebaiknya perjanjian kemitraan perkebunan kelapa sawit dibuat dihadapan notaris agar tercapai keseimbangan dalam hubungan kemitraan perkebunan kelapa sawit.

.....Partnerships as one form of cooperative relations between oil palm planters with the company as the owners of capital and technology is based on an agreement known as the plasma core partnership agreement palm oil plantations. In the implementation of fraud by many companies in this relationship. Notary as an official deed maker has a supervisory function that could cover the possibility of fraud by creating or making good agreement with considerations of legal consequences that arise from the agreement. Therefore should the oil palm plantation partnership agreement made before a notary in order to achieve a balance in the partnership of oil palm plantations.